

# FUNGSI DAN PERAN KELUARGA

Euis Sunarti<sup>1</sup>

## Wacana Batasan Pengertian Keluarga

Setiap orang memiliki gambaran dan pengertian tentang keluarga. Namun demikian diperlukan kesepakatan pembatasan pengertian keluarga, karena berkaitan dengan aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum, kesehatan, agama, politik, dan ekonomi. Di Amerika, pendefinisian keluarga memakan waktu dan debat yang panjang, bahkan sampai di tingkat senat. Hal tersebut dikarenakan terkait dengan kristalisasi dan politisasi kebijakan keluarga pada skala nasional. Pembahasan dan perbedaan pendapat mengenai pendefinisian keluarga umumnya berkaitan dengan ruang lingkup, struktur, dan komposisi keluarga (Hunter, 1991).

Settels, B.H., dalam Sussman & Steinmetz (1987) mengemukakan terdapat beberapa pendekatan dalam eksplorasi pengertian keluarga, diantaranya adalah : 1) keluarga dipandang sebagai abstraksi dari ideologi, 2) keluarga diposisikan memiliki citra romantis, 3) keluarga sebagai satuan perlakuan intervensi, 4) keluarga sebagai proses, 5) keluarga sebagai tujuan akhir (*last resort*), dan 6) keluarga dipandang sebagai suatu jaringan.

Indonesia telah merumuskan pengertian keluarga seperti yang dicantumkan dalam UU No 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Tim perumus mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (BKKBN, 1992). Definisi tersebut lebih

---

<sup>1</sup> Bagian tinjauan pustaka Disertasi Euis Sunarti 2001. Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga dan Analisis Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan.

menekankan kepada komposisi keluarga, sedangkan pengertian yang lebih komprehensif diberikan kaum fungsionalis (penganut paham struktural-fungsional) yang memandang keluarga sebagai struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya, dan juga untuk memelihara masyarakat yang lebih luas (Pitts, 1964 *dirujuk* Kingsbury & Scanzoni, *dalam* Boss et al., 1993).

### **Keluarga sebagai sistem**

Menurut Klein dan White (1996) sistem diartikan sebagai suatu set objek, dan relasi antar objek tersebut dengan atribut-atributnya, berdasarkan asumsi: 1) elemen sistem saling berhubungan, 2) sistem hanya dapat dimengerti sebagai keseluruhan, 3) seluruh sistem mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungannya, dan 4) sistem bukan sesuatu yang nyata. Sedangkan menurut Winton (1995), sistem merupakan unit yang dibatasi aturan, dan terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Konsep sistem dijabarkan lebih lanjut dari ciri-cirinya yaitu (Kingsbury & Scanzoni *dalam* Boss, et al., 1993); 1) memiliki diferensiasi atau sosialisasi jenis peran, 2) peran diatur atau diorganisasi melalui serangkaian nilai dan norma yang menetapkan hak dan kewajiban seorang pelaku kepada yang lainnya, atau kepada masyarakat, 3) pemeliharaan lingkungan, individu internal lebih terikat kuat dibandingkan dengan individu luar, dan 4) sistem sosial memiliki suatu kecenderungan menuju keseimbangan atau homeostasis.

Kajian pustaka yang dilakukan Megawangi, Zeitlin, & Kramer *dalam* Zeitlin et al., (1995), keluarga sebagai sistem diartikan sebagai unit sosial dimana individu terlibat secara intim didalamnya, dibatasi oleh aturan keluarga, terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar anggota keluarga setiap waktu (Walker & Crocker, 1988). Namun demikian menurut Kreppner dan Lerner (1989) terdapat beberapa perbedaan perspektif terhadap keluarga sebagai sistem itu sendiri. Perbedaan perspektif tersebut adalah keluarga lebih dipandang sebagai : 1) suatu sistem interaksi umum anggota keluarga, 2) suatu seri interaksi yang dilakukan dua pihak (*diadic*), 3) sejumlah interaksi antara seluruh subkelompok keluarga : *diadic*,

*triadic*, dan *tetradic*, serta 4) sistem hubungan internal keluarga sebagai reaksi terhadap sistem sosial yang lebih luas. Dibandingkan kelompok asosiasi lainnya, keluarga memiliki “daya hidup” lebih lama, serta hubungan biologi dan intergenerasi yang berkaitan dengan ikatan kekerabatan yang lebih luas (Klein & White, 1996)

Pendekatan keluarga sebagai sistem didasarkan pada teori struktural fungsional yang berlandaskan empat konsep yaitu : sistem, struktur sosial, fungsi, dan keseimbangan. Teori ini membahas bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi orang lain dan oleh institusi sosial, dan bagaimana perilaku tersebut pada gilirannya mempengaruhi orang lain dalam proses aksi-reaksi berkelanjutan. Teori ini memandang tidak ada individu dan sistem yang berfungsi secara independen, melainkan dipengaruhi dan pada gilirannya mempengaruhi orang lain atau sistem lain (Winton, 1995). Teori struktural fungsional mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sosial, yang merupakan sumber utama struktur masyarakat (Megawangi, 1999).

Pandangan penganut teori struktural fungsional yang melihat sistem sosial sebagai sistem yang harmonis, berkelanjutan dan senantiasa menuju keseimbangan, berlawanan dengan pandangan penganut teori konflik sosial. Teori konflik sosial memandang konflik sebagai sesuatu hal yang alamiah, normal, dan tidak dapat dielakkan dalam seluruh sistem sosial, bahkan konflik dianggap sebagai sumber motivasi yang dibutuhkan untuk perubahan. Konflik ada dimana-mana, dalam semua jenis interaksi sosial, dan pada seluruh tingkat organisasi sosial. Bahkan konflik dipandang sebagai elemen dasar kehidupan sosial manusia dan keberlangsungan sistem (Winton, 1995; Klein & White, 1996; Farrington & Chertok dalam Boss, et al., 1993).

Selain pandangan tersebut, Farrington dan Chertok dalam Boss, et al., (1993) meringkas beberapa konsepsi mengenai sosial konflik dari berbagai sudut pandang yaitu : 1) konflik, kompetisi, dan perjuangan manusia terhadap sumberdaya

terbatas, 2) teori konflik Marx sebagai kondisi struktur dasar masyarakat, 3) model psikoanalitik Freud's tentang konflik intra psikis, 4) spekulasi Weber terhadap hubungan alami antar konflik dan kekuasaan (*power*), dan 5) fungsi sosial integratif, yang memandang penyediaan konflik diperlukan untuk tugas sosial yang lebih besar.

Menurut pandangan penganut sosial konflik, keluarga sebagai sistem juga tidak terlepas dari konflik antar anggota di dalamnya. Besarnya (prevalensi) konflik individu dimotivasi oleh minat individu, dan berhubungan dengan kebutuhan, nilai, tujuan, dan sumberdaya. Terhadap sumberdaya yang terbatas, terdapat dua kemungkinan konflik yaitu : 1) perbedaan minat, kebutuhan, nilai dan tujuan, serta 2) individu berbeda dalam waktu bersamaan menginginkan hal yang sama pada sumber daya terbatas (Farrington & Chertok *dalam* Boss, et al., 1993).

Dilihat dari rumusan kebijakan dan program-programnya, pengambil kebijakan dan kalangan birokrat Indonesia menganut teori keluarga struktural fungsional. Hal tersebut dapat tercermin dari rumusan keluarga dalam Garis Besar Haluan Negara, UU No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, serta kebijakan keluarga lainnya. Menurut T.O Ichrami (1997), pemerintah melalui rumusan keluarga dalam UU No 10 tahun 1992 mengkomunikasikan tipe ideal tertentu mengenai keluarga, yang diharapkan menjadi acuan bagi perilaku keluarga, atau dengan kata lain disebut sebagai ideologi keluarga. Petunjuk lainnya adalah dengan dirumuskannya fungsi keluarga sebagai patokan ideal mengenai keluarga yang ingin diwujudkan melalui berbagai program-program pembangunan (BKKBN, 1996).

Konsep struktur sosial menurut teori struktural fungsional meliputi bagian-bagian dari sistem, dan penjelasan bagaimana bagian-bagian sistem tersebut diorganisasikan. Sedangkan konsep keseimbangan yang mengacu kepada konsep homeostasis suatu organisme, diartikan sebagai kemampuan suatu sistem

(termasuk kemampuan adaptasi) untuk memelihara stabilitas agar kelangsungan sistem tetap terjaga (Winton, 1995).

### **Fungsi Keluarga.**

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem tersebut berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga (Megawangi, 1999). Menurut Winton (1995), fungsi merupakan konsekuensi dari perilaku seseorang atau aksi kelompok. Konsekuensi aksi yang menguntungkan bagi sistem disebut dengan fungsional, sedangkan aksi yang mendatangkan kerugian bagi sistem disebut disfungsional. Sedangkan menurut McIntyre (1966) yang dikutip Kingsbury dan Scanzoni *dalam* Boss, et al., (1993), fungsi diartikan sebagai kontribusi atau sumbangan dimana suatu item atau elemen memelihara keseluruhan. Resolusi Majelis Umum PBB menguraikan fungsi-fungsi utama keluarga adalah : “Keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera” (Megawangi, 1994). Agar fungsi keluarga berada pada kondidi optimal, perlu peningkatan fungsionalisasi dan struktur yang jelas, yaitu suatu rangkaian peran dimana sistem sosial dibangun.

Kajian terhadap fungsi keluarga yang dirumuskan berbagai pakar dan institusi yang menangani keluarga menunjukkan variasi baik dari sistem kategori maupun jumlahnya, seperti disajikan pada Tabel 1. Namun demikian pembagian fungsi keluarga ekspresif dan instrumental menurut Rice dan Tucker dapat mengakomodasi berbagai kategori fungsi lainnya. Keluarga berfungsi untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki (fungsi ekonomi) melalui prokreasi, sosialisasi (termasuk penetapan peran sosial), dukungan dan perkembangan

anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi (cinta kasih, ikatan suami-istri), perkembangan, termasuk moral (agama), loyalitas dan sosialisasi.

Tabel 1. menunjukkan bahwa fungsi reproduksi dan fungsi sosialisasi dan pendidikan merupakan fungsi yang selalu disebut oleh kelima sumber pustaka tersebut. Jika dikaitkan dengan teori sistem sebagai bagian dari teori struktural fungsional, kedua fungsi tersebut merupakan fungsi penting dalam pemeliharaan dan kesinambungan suatu sistem sosial, dan secara spesifik melalui pengembangan sumber daya manusia.



Tabel 1. Fungsi Keluarga.

BKKBN <sup>1)</sup>	United Nation <sup>2)</sup>	Mattesich & Hill <sup>3)</sup>	Rice & Tucker <sup>4)</sup>	Roberta Berns <sup>5)</sup>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keagamaan</li> <li>2. Sosial Budaya</li> <li>3. Cinta kasih,</li> <li>4. Melindungi</li> <li><b>5. Rreproduksi</b></li> <li><b>6. Sosialisasi dan pendidikan</b></li> <li>7. Ekonomi</li> <li>8. Pembinaan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuhan ikatan suami istri</li> <li><b>2. Prokreasi dan hubungan seksual</b></li> <li><b>3. Sosialisasi dan pendidikan anak</b></li> <li>4. Pemberian nama dan status</li> <li>5. Perawatan dasar anak ( dan lanjut usia)</li> <li>6. Perlindungan anggota keluarga</li> <li>7. Rekreasi dan perawatan emosi</li> <li>8. Pertukaran barang dan jasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan fisik</li> <li><b>2. Sosialisasi dan pendidikan</b></li> <li><b>3. Akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi</b></li> <li>4. Kontrol perilaku sosial dan seksual</li> <li>5. Pemeliharaan moral keluarga dan motivasi untuk berperan di dalam dan di luar keluarga</li> <li>6. Akuisisi anggota keluarga dewasa melalui pembentukan pasangan seksual</li> <li>7. Melepaskan anggota keluarga dewasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fungsi ekspresif : memenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan, termasuk moral, loyalitas, dan sosialisasi anak</li> <li>2. fungsi instrumental : manajemen sumberdaya untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui : a) <b>prokreasi dan sosialisasi anak</b>, serta b) dukungan dan pengembangan anggota keluarga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Reprod</b></li> <li><b>2. Sosialis atau pendid</b></li> <li>3. Penetapan peran se</li> <li>4. Dukungan ekonom</li> <li>5. Dukungan emosi.</li> </ol>

Sumber :

<sup>1)</sup> BKKBN, 1996

<sup>2)</sup> United Nation (1993)

<sup>3)</sup> Zeitlin et al., (1995)

<sup>4)</sup> Rice & Tucker (1986)

<sup>5)</sup> Berns (1997)

## Peran Keluarga dalam Keberlangsungan Sistem Sosial

Talcott Parson percaya bahwa keberlangsungan (*survival*) merupakan fungsi utama seluruh masyarakat, melibatkan pembelajaran terhadap segala sesuatu yang mengikat anggota masyarakat untuk bersatu, melalui bahasa serta nilai-nilai sosial dan budaya. Terdapat empat masalah fungsional utama dalam keberlangsungan sistem yaitu : 1) masalah adaptasi yaitu mengacu pada perolehan sumberdaya atau fasilitas yang cukup dari lingkungan luar sistem, dan kemudian mendistribusikannya di dalam sistem, 2) masalah pencapaian tujuan mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan tujuan, memotivasi dan memobilisasi usaha dan energi dalam sistem untuk mencapai tujuan, 3) masalah integrasi mengacu kepada pemeliharaan ikatan dan solidaritas, dan melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem, dan mencegah gangguan utama dalam sistem, serta 4) masalah *latency* mengacu kepada proses dimana energi dorongan disimpan dan didistribusikan di dalam sistem, melibatkan dua masalah saling berkaitan yaitu pola pemeliharaan dan pengelolaan masalah atau ketegangan (Hamilton, 1983; Winton, 1995). Sistem sosial akan hancur atau pecah jika tidak mengelola keempat masalah fungsional tersebut (Winton, 1995)

Keempat masalah tersebut berada pada tingkatan sistem kepribadian, sosial, dan budaya. Keluarga sebagai unit sosial terkecil merupakan tulang punggung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut yang selanjutnya menentukan keberlangsungan serta keseimbangan sistem sosial yang lebih luas. Sedangkan Robert Winch (1963) seperti dikutip Winton (1995) menyusun daftar fungsional sistem sosial sebagai berikut : 1) penggantian anggota sistem yang meninggal, 2) produksi dan distribusi barang dan jasa dalam mendukung anggota masyarakat, 3) Persediaan dan perlengkapan harus disediakan untuk akomodasi konflik dan pemeliharaan tuntutan internal maupun eksternal, 4) Pelatihan dalam penggantian anggota masyarakat agar berpartisipasi, dan 5) Penyusunan prosedur bagi pengelolaan krisis emosi, serta harmonisasi tujuan individu dengan nilai sosial.



Masalah fungsional penggantian anggota yang meninggal dalam sistem, secara spesifik dilakukan keluarga melalui fungsi reproduksi. Sumbangan sistem sosial yang lebih luas untuk mendorong keluarga melaksanakan fungsi tersebut dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai. Sebagai mana kajian mengenai keluarga Jawa yang dilakukan Megawangi, Zeitlin, dan Coletta *dalam* Zetlin et al, (1995) yang menunjukkan adanya nilai dan budaya Jawa yang memandang rendah kepada wanita yang mandul, serta menghargai atau bangga kepada wanita yang subur.

### **Peran Keluarga Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Pentingnya pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dilandasi kenyataan bahwa melimpahnya sumber daya alam bukan merupakan jaminan berhasilnya gerakan pembangunan. Sebagai perubahan yang dikehendaki kearah perbaikan kesejahteraan manusia, pembangunan merupakan azazi dari kodrat manusia yang senantiasa menginginkan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Semakin banyak tuntutan pemenuhan kebutuhan, dan semakin terbatas sumber-sumber daya yang tersedia, memacu manusia untuk memikirkan cara-cara memenuhi kebutuhan tersebut. Proses berfikir tersebut merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakatnya. Sedangkan hakekat dari perkembangan masyarakat adalah perubahan (Khairuddin, 1992).

Walaupun berbagai pemikiran mengenai pentingnya pembangunan SDM sudah dikumandangkan sejak dini (Owens & Shaw, 1980; Rahardjo, 1983; Soedjatmoko, 1983; Muhadjir, 1983; Sanafiah Faisal, 1981; Zen, 1982), namun pada beberapa Pelita pertama pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia relatif terabaikan, dan tema sentral pembangunan lebih dititikberatkan kepada pembangunan fisik dan material (Soedjatmoko, 1983; Zen, 1981; Rahardjo, 1983).

Dilandasi pengertian kualitas sebagai gabungan karakteristik yang menentukan derajat kehandalan (*degree of excellence*), Hidayat syarief (1997) mendefinisikan kualitas SDM sebagai gabungan dari karakteristik segenap sumberdaya yang

ada dalam diri manusia, mencakup karakteristik fisik, akal, kalbu, dan nafsu yang menentukan derajat kehandalan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Investasi untuk pengembangan anak usia dini memiliki arti penting dengan berbagai alasan yaitu (Young, 1996 *dikutip* Hidayat Syarief, 1997) :

“ 1) membangun SDM yang berkemampuan intelegensia tinggi, berkepribadian dan berperilaku sosial yang baik serta mempunyai ketahanan mental dan psikososial yang kokoh, 2) menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan menurunkan biaya sosial di masa datang dengan meningkatkan efektivitas pendidikan, 3) mencapai pemerataan sosial ekonomi masyarakat, termasuk mengatasi kesenjangan gender, 4) meningkatkan efisiensi investasi pada sektor yang lain karena intervensi program gizi dan kesehatan pada anak-anak akan meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup anak, sedangkan intervensi dalam program pendidikan akan meningkatkan kinerja anak dan mengurangi kemungkinan tinggal kelas, dan 5) membantu kaum ibu dan anak-anak dengan semakin meningkatnya jumlah ibu bekerja dan kepala rumah tangga wanita, pemeliharaan anak yang aman menjadi semakin penting “

Sedangkan Myers (1992) menekankan beberapa alasan pentingnya investasi dalam perkembangan anak sejak dini. Beberapa argumen tersebut adalah : 1) hak asasi anak untuk berkembang sampai potensi optimal, 2) nilai sosial dan moral, 3) sumbangan ekonomi ditinjau dari produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, 4) kecukupan program, 5) kesetaraan sosial, 6) mobilisasi sosial, 7) alasan ilmiah, serta 8) lingkungan demografi dan perubahan sosial.

#### **a. Keluarga sebagai Institusi Pertama dalam Pengembangan SDM.**

Keluarga sebagai institusi pertama dalam pembangunan SDM dilandasi oleh teori lingkungan pembelajaran Bronfenbrenner, yang dikenal dengan “*The Learning Environment*”. Kerangka tersebut menjelaskan empat sistem lingkungan yang divisualisasikan sebagai struktur sarang “*nesting structure*”, dimana bagian dalam merupakan bagian dari struktur yang lebih luar. Keempat sistem tersebut adalah : 1) sistem mikro terutama hubungan “*dyadic*” antara anak dan pengasuh utama, 2) sistem meso merupakan perluasan dimensi pembelajaran pada lebih dari satu setting, melalui dukungan partisipasi dan interaksi yang lebih luas seperti kelompok sebaya, 3) sistem ekso merupakan

pembelajaran dari lingkungan dimana seorang anak tidak berpartisipasi secara langsung, dan 4) sistem makro merupakan sistem yang paling tinggi, merupakan cetakan biru kerangka hubungan ketiga sistem didalamnya (Berns, 1997; Bronfenbrenner, 1986; Myers, 1992). Dari teori tersebut dapat terlihat bahwa sebagaimana pendapat Berns (1997), keluarga merupakan tulang punggung sosialisasi anak.

#### **b. Keluarga Sebagai Institusi Utama dalam Pengembangan SDM.**

Keluarga sebagai institusi utama dalam pengembangan SDM dilandasi oleh kenyataan bahwa di keluargalah aktivitas utama kehidupan berlangsung. Peran keluarga yang berhubungan dengan fungsi ekonomi menjadi penting sebagai cerminan daya beli keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat berteduh, memperoleh pendidikan, dan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Peran keluarga yang berhubungan dengan fungsi cinta kasih juga sangat berperan dalam memberikan lingkungan psikologi yang sehat bagi semua anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang mencapai potensi optimum. Dalam perspektif itulah salah satu gerakan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan melalui optimalisasi fungsi keluarga (BKKBN, 1996).

Keluarga sebagai institusi utama dalam pengembangan SDM juga berkaitan dengan fungsi sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses dimana individu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang memungkinkannya berpartisipasi sebagai anggota kelompok atau masyarakat yang efektif (Brim, 1966 *dikutip* Berns, 1997), oleh karenanya berlangsung seumur hidup. Sedangkan menurut Talcott Parson sosialisasi berkaitan dengan efektivitas budaya dan sistem sosial sebagai mekanisme bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian (Hamilton, 1983).

Sosialisasi memungkinkan anak mengembangkan potensi dan membentuk hubungan kepuasan melalui : pengembangan konsep diri, penanaman konsep disiplin, penanaman ambisi, pengajaran peran sosial, dan pengajaran ketrampilan. Dibandingkan agen sosialisasi lainnya (sekolah, kelompok sebaya,

media, dan masyarakat), keluarga merupakan tulang punggung utama yang bertanggungjawab dalam sosialisasi individu, terutama pada fase anak-anak (Berns, 1997). Melalui sosialisasi, anak akan memasuki sistem sosial sebagai orang dewasa, dan akan memperoleh berbagai pelajaran dan latihan untuk mengenal norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, sehingga mampu melakukan berbagai peran sosial yang diharapkan, menurut kualitas yang diantisipasi oleh lingkungan atau masyarakat sekitarnya (T.O. Ichromi, 1997).

Keluarga merupakan tempat sosialisasi untuk kerja, dimana anak mengenal dan mempelajari sikap-sikap yang diperlukan dalam memperoleh dan memasuki pekerjaan yang layak yang akan memungkinkannya hidup mandiri secara ekonomis. Keterampilan fisik, kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain, keterikatan atau komitmen kepada hal-hal yang dijunjung tinggi dalam lingkungannya merupakan aspek yang disosialisasikan dalam keluarga (T.O. Ichromi, 1997).

Berbagai tujuan dan manfaat sosialisasi seperti telah dikemukakan, menunjukkan kompetensi kecerdasan emosional (*emotional intelligence*), yang semakin disadari merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan kehidupan seorang individu (Goleman, 1997). Begitu pula kajian Megawangi (1994) mengenai peran keluarga dalam peningkatan kualitas SDM menyongsong abad 21 menyimpulkan, bahwa kemampuan mengerjakan profesi yang “high-tech”, kreativitas berfikir dan kemampuan menjalin kerjasama, sikap sensitif terhadap lingkungan, sikap spiritualitas dan toleran, merupakan kompetensi individu dimana keluarga memegang peranan penting dalam proses saling penyesuaian progresif (*progressive mutual accomodation*) menurut teori Bronfenbrenner “*The ecology of Human Development*”.

### **Pembangunan Keluarga Sejahtera**

Menyadari pentingnya institusi keluarga, pemerintah memiliki komitmen terhadap pentingnya pembangunan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dan No 27 tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan. Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan munculnya sektor pembangunan keluarga sejahtera sejak GBHN tahun 1993, yang memberikan arah terhadap pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera mulai pelita VI. Demikian juga dengan dicanangkannya hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 1993, serta pencanangan Gerakan Keluarga sejahtera sejak 29 Juni 1994 (Mongid, 1996)

Keluarga sejahtera merupakan kondisi yang diidamkan semua keluarga. Menurut UU No 10/1992, keluarga sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (BKKBN, 1992).

Pembangunan keluarga sejahtera yang dicanangkan pemerintah melalui BKKBN dilakukan melalui tiga gerakan yaitu : 1) gerakan reproduksi keluarga sejahtera, didalamnya termasuk peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), gerakan keluarga sehat sejahtera, dan pembinaan ketahanan reproduksi dan kehidupan suami istri yang harmonis, 2) gerakan ekonomi keluarga sejahtera yang memihak kepada keluarga yang fungsi ekonominya lemah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, serta 3) gerakan ketahanan keluarga sejahtera yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga dalam mengembangkan keluarga yang sejahtera (Mongid, 1996; BKKBN, 1996)

Keluarga sejahtera merupakan hasil dari dinamika proses pengelolaan sumberdaya serta masalah-masalah dalam keluarga. Kondisi dinamik keluarga tersebut dikenal dengan ketahanan keluarga, seperti pengertian yang diberikan UU No 10 tahun 1992 (pasal 1 ayat 15) yaitu : “kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin” (BKKBN, 1992). Mengacu kepada konsep ketahanan pangan, Frankenberger (1998) mengartikan ketahanan keluarga sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (termasuk didalamnya kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial).

Peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting sehubungan dengan fakta adanya variasi kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan fungsi, melalui pengelolaan sumberdaya yang dimiliki, serta kemampuan keluarga dalam pengelolaan masalah dan stress (Krysan, Kristin, & Zill, 1990).

